

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 10

Wujudkan ASN Tertib Administrasi dan Pelaporan

SEMARANG - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Semarang, demi menciptakan tertib administrasi dan tertib pelaporan dalam pengelolaan keuangan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Lok Krida, Gedung Moch Ikhsan, Selasa (14/2).

"Kegiatan ini juga dapat dijadikan media untuk menciptakan persamaan resepsi secara terintegrasi dari organisasi perangkat daerah (OPD)," ujar Kepala BPKAD, Sri Martini.

Sri Martini menambahkan target dalam pelaksanaan sosialisasi ini adalah terciptanya pengelola keuangan yang lancar dan terkendali. "Dengan itu akan terwujud pemerintahan yang bersih dan tata kelola keuangan yang baik," tandasnya.

Sementara Sekda Pemkot Semarang Adi Tri Hananto menyambut baik dan menaruh harapan besar bahwa penyelenggaraan sosialisasi ini akan memberikan pencerahan dan pemahaman yang sama kepada semua pengelola kegiatan, utamanya para bendahara, PA/KPA untuk bagaimana melakukan penatausahaan keuangan yang semakin baik. "Tahun lalu, Kota Semarang memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK, dan target kita tahun ini harus meningkat menjadi WTP. Saya rasa itu bukan hal yang mustahil, namun juga tidak mudah. Butuh komitmen dan kesungguhan dari kawan-kawan. Salah satunya diwujudkan melalui penatausahaan keuangan daerah yang baik," tuturnya.

Menurutnya, perlu dilakukan sinkronisasi antara APBD dengan peraturan perundang-undangan khususnya Perwal Nomor 4 sehingga diperoleh adanya efisiensi antara penerimaan dan belanja daerah. "Bendahara adalah motor penggerak di masing-masing OPD, apa yang harus dilakukan? taati aturan yang berlaku, jika tidak ingin bermasalah nantinya," pungkas Adi.

Peserta dalam acara ini di antaranya pejabat penatausahaan keuangan atau kasubag keuangan, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan Pemkot Semarang. Dalam acara ini BPKAD mengundang pakar pengelola keuangan Haryanto, dari Universitas Diponegoro Semarang. (zal/ce1)